



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KOMISI IX DPR RI  
(Bidang : Kesehatan dan Ketenagakerjaan)**

---

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 7 (tujuh)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
Dengan	: Direktur Utama BPJS Kesehatan.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 19 Januari 2022
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Penjelasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Kesehatan Tahun 2022; 2. Penjelasan Penggunaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Tahun 2021; dan 3. Penjelasan tentang <i>Roadmap</i> perbaikan pelayanan kesehatan Program JKN.
Ketua Rapat	: H. Ansory Siregar, Lc. / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dilanjutkan oleh: Felly Estelita Runtuwene, SE./Ketua Komisi IX DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Suryatna, S.IP./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Peserta Rapat Hadir dan Virtual	: A. Fisik 23 orang Virtual 19 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Direktur Utama BPJS Kesehatan: Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK., beserta jajaran.

**i. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan dibuka pukul 10.30 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual, sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Demi meningkatkan mutu program Jaminan Kesehatan Nasional, Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan RI untuk:
  - a. melakukan peningkatan mutu layanan kesehatan, efektifitas pembiayaan dan kolektabilitas iuran peserta untuk menjaga kesinambungan finansial dan program JKN;
  - b. meningkatkan upaya terobosan untuk perluasan kepesertaan;
  - c. berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri RI terutama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemerintah Daerah untuk melakukan pembaruan data peserta PBI;
  - d. mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat tentang penggunaan layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan serta apabila ada peningkatan/perubahan layanan, penggunaan teknologi informasi dalam memberikan layanan; dan
  - e. mempermudah perluasan kerjasama dengan fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menjadi mitra BPJS Kesehatan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk mempersiapkan proyeksi kesehatan finansial jangka pendek maupun jangka panjang atas kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS).
3. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Kesehatan untuk memberikan data-data terkait :
  - a. Rincian penggunaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Tahun 2021 per provinsi dan kabupaten/kota;
  - b. Rincian penggunaan dana operasional BPJS Kesehatan dan hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Tahun 2021;
  - c. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Kesehatan Tahun 2022 termasuk rencana pengelolaan pengembangan Dana Jaminan Sosial (DJS);
  - d. Rincian pemasukan dari sumber lain/hibah tahun 2021;
  - e. Rincian pembiayaan penyakit katastropik tahun 2021;
  - f. Rincian utilisasi manfaat antar segmen peserta JKN; dan
  - g. Rincian perubahan data peserta PBI tahun 2021.

Paling lambat tanggal 26 Januari 2022.

4. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan pembayaran klaim pelayanan Kesehatan tertunggak di fasilitas kesehatan.
5. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan anggota dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini dan diserahkan paling lambat 26 Januari 2022.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.50 WIB.

Jakarta, 19 Januari 2022

KETUA RAPAT/  
KETUA KOMISI IX DPR RI,



FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE.  
A-393